

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Sebuah *Organized crime* adalah sebuah istilah yang tepat untuk menggambarkan sebuah kelompok kejahatan terorganisir dengan sebuah struktur yang dimilikinya dengan segala bentuk tindakannya yang berbasis bisnis ilegal atau berbasis kriminal. Sebuah *organized crime* pada umumnya berawal dari sebuah kelompok kecil dengan lingkup bisnis yang hanya bersifat regional atau hanya memiliki cakupan yang kecil saja, akan tetapi pada perkembangannya dimana sebuah *organized crime* yang memang terstruktur dengan baik dapat berkembang lebih besar menjadi *organized crime* yang memiliki cakupan bisnis hingga antar negara atau disebut dengan *Transnational Organized Crime*.

Sebagai *Transnational Organized Crime* tentunya kepentingan atau tujuan yang lebih besar daripada sebuah *organized crime*, dan maka dari itu kemudian untuk mewujudkan atau melindungi kepentingannya tersebut sebuah *Transnational Organized Crime* akan menekan dan bahkan mempengaruhi pihak-pihak yang terlibat dan memiliki pengaruh terhadap terwujudnya kepentingan dari *organized crime* tersebut.

#### **I. LATAR BELAKANG**

*Yakuza* adalah salah satu organisasi yang hingga saat ini masih ada di tengah-tengah kehidupan masyarakat Jepang. Sejarah *yakuza* di mulai pada abad ke 16,

bersamaan dengan munculnya tokoh dari shogun yang bernama Tokugawa yang waktu itu menjadi tokoh pemersatu masyarakat Jepang sebagai shogun pertama pada tahun 1604, karena adanya peralihan kekuasaan yang mengakibatkan sekitar 555 ribu samurai, petarung dan ahli strategi peperangan mendadak menjadi pengangguran atau disebut sebagai kaum *ronin*.<sup>1</sup>

Banyak dari para ronin atau sebutan untuk para pengangguran di Jepang yang kemudian menjadi penjahat. Mereka disebut sebagai *kabuki-mono* atau samurai yang sering menimbulkan masalah dengan berkelana menggunakan pedang dan mereka berbicara satu sama lain dalam bahasa slang dan kode rahasia. Terdapat kesetiaan tinggi antara sesama ronin sehingga kelompok ini sulit dibasmi. Untuk melindungi kota dari para *kabuki-mono*, kota-kota kecil di Jepang membentuk *machi-yakko* yaitu semacam satgas desa. Terdiri dari para pedagang, pegawai, dan orang biasa yang mau menyumbangkan tenaganya untuk menghadapi kaum *kabuki-mono*. Walaupun mereka kurang terlatih dan jumlahnya sedikit, tetapi ternyata para anggota *machi-yakko* ini sanggup menjaga daerah mereka dari serangan para *kabuki mono*. Di kalangan rakyat Jepang abad ke 17, kaum *machi-yakko* pun dianggap sebagai pahlawan, namun seiring dengan perkembangan *machi-yakko* terbagi menjadi dua yaitu kaum *bakuto* dan *tekiya*, mereka ini kemudian berubah dari semula adalah kaum yang bertugas melindungi masyarakat menjadi kaum ditakuti masyarakat. Berawal dari dua kaum ini, khususnya pada kaum *bakuto* atau penjudi dan salah satu konfigurasi kartu ini adalah kartu

---

<sup>1</sup> Kristinn Árnason. 2014. “*Yakuza: History of Yakuza*”, Siggilum Universitatis Islandiae, Háskóli Íslands, pages 7, pada tanggal 10 April 2016, pada pukul 20.26

dengan nilai (8-9-3) yang dalam bahasa Jepang menjadi Ya-Ku-Za yang kemudian menjadi asal nama dari “*yakuza*”.<sup>2</sup>

*Yakuza* telah berevolusi dari perusuh di zaman Edo sampai menjadi mafia modern yang berjudi dan perdagangan ilegal. Setelah zaman Perang Dunia II, *yakuza* semakin tumbuh menjadi sindikat kejahatan yang telah mendunia.<sup>3</sup> dan jika menyorot tentang bisnis *yakuza* akan lebih mengacu kepada bisnis gelap dari *yakuza* itu sendiri seperti narkoba, perdagangan senjata, pemalsuan, dan penyelundupan wanita untuk perdagangan budak seks, serta masih banyak mulai dari bisnis legal maupun illegal.<sup>4</sup>

Diluar negeri sendiri untuk menjembatani bisnisnya dan sebagai criminal network mereka memiliki jaringan kerja dengan *Sicilian* yang merupakan mafia asal Tiongkok, *American Mafia*, *Columbia drug cartel*, *Jamaican Posses*, dan berbagai sindikat kriminal lainnya yang tersebar di seluruh dunia.<sup>5</sup> Dapat dikatakan bahwa selain berpengaruh di dalam negeri, *yakuza* juga berpengaruh di lingkup internasional yang mana keberadaannya dianggap sebagai salah satu bentuk kejahatan transnasional. Sudah telah lama *yakuza* memperluas wilayah kekuasaannya bahkan melewati wilayah

---

<sup>2</sup> Rifan Aditya. 2011, “*Piramida Klen Yakuza dan Kokohnya Jaringan Mafia di Jepang*”, Jurnal Antropologi Budaya Universitas Gadjah Mada, (Yogyakarta, Academia, 2011), halaman 4, pada tanggal 2 Desember 2014 14.35

<sup>3</sup> Ibid, halaman 4, pada tanggal 10 November 2015, pada pukul 11.45

<sup>4</sup> Bruce A. Gragert. 2010, “*Yakuza: The Warlords of Japanese Organized Crime*,” *Annual Survey of International & Comparative Law*” Vol. 4: Iss. 1, Article 9 , pada tanggal 10 November 2015, pada pukul 16.10

<sup>5</sup> Victoria Chemko. 2002, “*The Japanese Yakuza : Influence of Japan’s International Relations and Regional Politics (East Asia and Latin America)*”, diakses dari [http://www.conflicts.rem33.com/images/yett\\_secu/yakuza\\_chemko.htm](http://www.conflicts.rem33.com/images/yett_secu/yakuza_chemko.htm) , pada tanggal 11 November 2015, pada pukul 06.39

Jepang, dimulai pada tahun 1920an ketika bergabung dengan Black Dragon Society yang kemudian menguasai wilayah Asia.<sup>6</sup>

Sebagai sebuah organisasi kriminal, tentunya *yakuza* khawatir dengan pemerintah Jepang yang suatu saat dapat mengeluarkan kebijakan untuk menekan keberadaannya maka *yakuza* ingin menghindari sanksi dari pemerintah Jepang maka kemudian tentunya *yakuza* membutuhkan perlindungan dan pihak yang tepat untuk melindunginya adalah pemerintah itu sendiri dan maka dari itu kemudian *yakuza* melakukan pendekatan ke dalam pemerintah dan aktor aktor politik guna melindungi atau mengamankan bisnisnya.

Pada awalnya hubungan ini terjalin adalah berkat usaha seorang pria yang lahir di pertengahan 1800-an di kota Fukuoka bernama Mitsuru Toyama dan dari dialah kemudian mengubah arah dari kedua kejahatan terorganisir dan politik di Jepang,<sup>7</sup> Contoh kasus pertamanya adalah Pada tahun 1892, selama pemilu pertama yang pernah nasional di Jepang, Toyama melakukan operasi dengan skala besar pertama yang pernah antara sayap kanan dan *yakuza*. Toyama dan agen Dark Ocean Society atau sebutan untuk kelompok ultranasionalisnya bergabung dengan 300 anggota geng

---

<sup>6</sup> Bella Fokker Andini. 2015, “*Pengaruh Yakuza dalam Dinamika Hubungan Internasional Jepang*”, dikutip dari [http://bella-fokker-fisip13.web.unair.ac.id/artikel\\_detail-142406-MBP%20Asia%20Timur-Pengaruh%20Yakuza%20dalam%20Dinamika%20Hubungan%20Internasional%20Jepang.html](http://bella-fokker-fisip13.web.unair.ac.id/artikel_detail-142406-MBP%20Asia%20Timur-Pengaruh%20Yakuza%20dalam%20Dinamika%20Hubungan%20Internasional%20Jepang.html), pada tanggal 24 Januari 2016, pada pukul 07.17

<sup>7</sup> Bruce A. Gragert. 2010, “*Yakuza The Warlords of Japanese Organized Crime*”, *Annual Survey of International & Comparative Law*: Vol. 4: Iss. 1, Article 9, pages 11, pada tanggal 24 Januari 2016, pada pukul 10.00

yakuza untuk melancarkan kampanye kekerasan untuk mendukung politisi konservatif.<sup>8</sup>

Pada perkembangannya *yakuza* juga sempat mengalami kemunduran dimana pada Perang Dunia 2 dimana tenaga mereka digunakan sebagai militer, namun kemudian kondisi membaik dengan adanya bantuan pasukan amerika karena pada kasus ini para pejabat intelijen militer diam-diam membantu *yakuza* dan kelompok ultranasionalis dalam menekan paham komunis, akan tetapi yang hal yang paling membantu yang dilakukan AS adalah dengan memberikan kekuasaan politik *yakuza* untuk membebaskan penjahat Kelas A perang bernama Yoshio Kodama. Hal ini dilakukan karena angkatan pendudukan AS khawatir bahwa komunisme akan menyebar ke Jepang, dan Kodama memiliki koneksi dalam dunia kriminal dan pemerintah untuk menekan bahwa ancaman yang dirasakan dan Kodama adalah orang yang sebelumnya telah beroperasi di China dan yang memiliki jaringan intelijen yang luas di sana, yang maka dari itu kemudian Kodama menjadi salah satu orang paling kuat di Jepang pascaperang, dan ia juga menjadi link *yakuza* untuk tingkat tertinggi pemerintah Jepang. Kegiatan Kodama sebelum dan selama Perang Dunia II membuatnya individu yang sangat kaya, dan dia menggunakan uang itu setelah dibebaskan dari penjara untuk membiayai berdirinya *Liberal Democratic Party* (LDP) yang dikendalikan pemerintah Jepang sampai awal 1990.<sup>9</sup> Kodama juga memiliki

---

<sup>8</sup> Ibid

<sup>9</sup> David Kaplan & Alec Dubro. 2003, "*Yakuza: Japan's Criminal Underworld*", University of California Press, pages 67, pada pukul 11.34

beberapa peran di dunia politik di mana dia membantu Nobusuke Kishi, juga penjahat perang, menjadi Perdana Menteri Jepang pada tahun 1957, dan dia juga membantu Bamboku Ohno untuk menjadi Sekjen LDP pada tahun 1963.<sup>10</sup>

Hubungan *yakuza* dan politik di masa politik modern Jepang berlangsung dalam suasana pemerintahan yang berhaluan konservatif. Meskipun setelah meninggalnya Yoshio Kodama pada 1984,<sup>11</sup> dan dengan kondisi pasca perang Meskipun polisi menindak sindikat *yakuza* dari waktu ke waktu selama tahun 1950-an, 1960-an, dan 1970-an, banyak pejabat tinggi di partai yang berkuasa (LDP) yang kurang peduli dengan operasi sehari-hari dari *yakuza* dan lebih tertarik dalam membentuk aliansi dengan mereka.<sup>12</sup> *Yakuza* memainkan peran penting dalam membantu banyak politisi membentuk karir politik mereka melalui bantuan orang seperti Yoshio Kodama.

Jepang pada saat ini adalah negara yang menganut sistem parlementer yang sangat membatasi kekuasaan Kaisar Jepang. Sebagai kepala negara seremonial, kedudukan Kaisar Jepang diatur dalam konstitusi sebagai “simbol negara dan pemersatu rakyat”. Kekuasaan pemerintah berada di tangan Perdana Menteri Jepang dan anggota terpilih Parlemen Jepang, sementara kedaulatan sepenuhnya berada di tangan rakyat Jepang. Kaisar Jepang bertindak sebagai kepala Negara dalam urusan diplomatik, dengan demikian, ketika membicarakan sistem pemerintahan Jepang

---

<sup>10</sup> Ibid, pages 82

<sup>11</sup> Ibid, pages 113

<sup>12</sup> Ibid, pages 78

(dalam arti luas) berarti membicarakan hubungan antar organ-organ negara atau lembaga-lembaga negara yang ada di Jepang yaitu supra struktur yang terdiri dari Perdana Menteri, Diet, dan MA serta infra struktur politik yang terdiri dari Partai politik, Interest Group, Pressure Group, Media Massa, dan Tokoh Politik.

Mengingat Jepang adalah negara yang menganut sistem demokrasi dimana setiap pihak bisa memberikan aspirasinya maka tentunya ada partai politik sebagai salah satu wadah untuk menampung aspirasi masyarakat dan ditambah juga Jepang adalah negara dengan multi partai, namun sistem multi partai hanya berlangsung hingga tahun 1955 ketika partai-partai konservatif bergabung menjadi sebuah partai dengan nama *Liberal Democratic Party* (LDP), enam bulan setelah partai-partai sosialis melakukan hal yang sama dengan membentuk *Japan Socialist Party* (JSP). Sehingga pada tahun 1955, sistem multi partai berubah menjadi sistem dua partai untuk sementara waktu dan pada saat ini disebut sebagai *sistem politik 1955*.<sup>13</sup>

Begitu juga dengan beberapa golongan-golongan yang ada di Jepang diantaranya lain kelompok perusahaan-perusahaan besar yang ada di Jepang atau kelompok Big Business, memiliki peran juga dalam penentuan dan pengambilan kebijakan di Jepang. Terkadang dikarenakan kondisi politik di Jepang interest group bisa berkembang dan berubah menjadi pressure group yang memaksakan kehendaknya kepada pihak penguasa. Disini kemudian pihak supra struktur yang menentukan dan

---

<sup>13</sup> Usmar Salam, 1991, "*Perkembangan Partai Politik di Jepang (1945-1990)*" Laporan Penelitian FISIPOL UGM, halaman 9, pada tanggal 18 Januari 2016, pada pukul 21.08

membuat kebijakan dan dari pihak infrastruktur juga dapat mempengaruhi kebijakan tersebut dengan melakukan pendekatan kepada para petinggi negara.

*Yakuza* bisa dimasukkan ke dalam “big business” yang memiliki pengaruh pada pengambilan keputusan yang ada di Jepang karena *yakuza* berada di pemerintahan. Dijelaskan sebelumnya juga berawal dari restorasi Meiji dimana Jepang membawa pembaharuan dalam tata pemerintahan dan kehidupan sosial masyarakat di Jepang. Jepang telah mengalami modernisasi, dan mulai meninggalkan simbol-simbol feodalisme, maka dari itu kemudian muncul pertentangan anti asing atau ultranasionalis dimana *yakuza* sebagai salah satu pendukungnya.<sup>14</sup> Partisipasi *yakuza* berpartisipasi dalam turut serta menyumbangkan tenaga tentara untuk alasan patriotis, yaitu membela Jepang dalam Perang Dunia II,<sup>15</sup> dan yang paling penting adalah Yashio Kodama dengan hal yang dilakukannya pasca perang dunia kedua.

Hingga saat inipun hubungan dengan para pemerintah dan politisi di Jepang masih terjalin dengan terbukti bahwa dengan adanya bisnis *yakuza* yang ada di luar negeri, mereka dengan bebas melakukan bisnisnya karena dalam sistem Jepang, *Yakuza* diakui secara hukum entitas yang beroperasi secara bebas dan memiliki hubungan yang jelas untuk bank, bisnis yang sah, dan politisi terkemuka, dan pada kasus ini adalah pernyataan untuk memerangi kejahatan terorganisir oleh Obama

---

<sup>14</sup> Richard Susilo. 2013, “*Yakuza Indonesia*”, Jakarta : Penerbit buku Kompas, halaman 23, pada tanggal 11 November 2015, pada pukul 19.51

<sup>15</sup> Bruce A. Gragert. 2010, “*Yakuza: The Warlords of Japanese Organized Crime*,” *Annual Survey of International & Comparative Law*” Vol. 4: Iss. 1, Article 10 , pada tanggal 11 November 2015, pada pukul 20.10



terkait tindakan yakuza di AS.<sup>16</sup> Terlihat bahwa disini kepentingan *yakuza* terpenuhi dengan adanya hubungan antara *yakuza* dan kelompok pemerintahan termasuk juga kebijakan luar negeri Jepang terkait dengan tindakan dari *yakuza* tersebut dan hal ini tentunya tidak sesuai dengan komitmen Jepang yang menandatangani *U.N. Convention Against Transnational Organized Crime* pada tahun 2000 dimana Jepang akan mendukung dan melawan tindakan kejahatan transnasional dalam berbagai bentuk seperti kejahatan ekonomi, *humantrafficking*, *drugtrafficking*, dan masih banyak tindakan kejahatan lainnya,<sup>17</sup> yang pada prakteknya justru pada kasus ini Jepang sendiri tidak meratifikasi *U.N. Convention Against Transnational Organized Crime* tersebut.

## II. RUMUSAN MASALAH

Mengapa Jepang tidak memenuhi kewajibannya sebagai penandatangan U.N. Convention Against Transnational Organized Crime pada tahun 2000?

---

<sup>16</sup> John Rogin. 2012, “Obama takes on... the Yakuza?”, dikutip dari <http://foreignpolicy.com/2012/02/24/obama-takes-on-the-yakuza/>, pada tanggal 25 Januari 2016, pada pukul 11.05

<sup>17</sup> Jake Adelstein. 2012, “The Yakuza Lobby: How Japan’s murky underworld became the patron and power broker of the ruling party that intended to clean up politics”, The Foreign Policy Group, pada tanggal 27 Januari 2016, pada pukul 01.23

### III. KERANGKA PEMIKIRAN

Untuk menjawab rumusan masalah di atas, penulis akan menggunakan 2 kerangka pemikiran :

#### 1. Pressure Group

Konsep Pressure Group menurut C N Trueman adalah Sebuah kelompok penekan dapat digambarkan sebagai kelompok yang terorganisir yang tidak memasang kandidat untuk pemilihan, tetapi berusaha untuk mempengaruhi kebijakan atau undang-undang pemerintah. Mereka juga dapat digambarkan sebagai “kelompok kepentingan”, “kelompok lobi” atau “kelompok protes”. Beberapa orang menghindari menggunakan istilah “tekanan kelompok” karena secara tidak sengaja dapat diartikan sebagai berarti kelompok menggunakan tekanan yang sebenarnya untuk mencapai tujuan mereka, yang tidak selalu terjadi. Di Inggris, jumlah partai politik sangat kecil, sedangkan jumlah kelompok penekan berjalan ke ribuan; sebagai anggota partai politik telah jatuh, bahwa kelompok tekanan meningkat.<sup>18</sup>

Sebuah kelompok penekan dapat menggunakan berbagai metode yang berbeda dengan hukum pengaruh. Pertama, itu hanya dapat menginformasikan legislator dari preferensi anggotanya. Kedua mungkin

---

<sup>18</sup> C N Trueman. 2015, "*What are pressure groups*", diakses dari <http://www.historylearningsite.co.uk/british-politics/pressure-groups/what-are-pressure-groups/> , pada tanggal 12 November 2015, pada pukul 00.06

juga memberikan uang atau waktu untuk membantu dengan kampanye pemilu. Ketiga, anggotanya dapat mengancam, sebagai sebuah kelompok, untuk memilih sebagai sebuah blok. Dengan melakukan ini mereka berjanji untuk membantu seorang legislator koperasi, dan mengancam untuk menyakiti seorang legislator non-kooperatif. Keempat, kelompok penekan dapat mempercepat undang-undang dengan menulis tagihan dan membantu legislator membuat perjanjian progresif. Akhirnya kelompok penekan upaya saya untuk mempengaruhi anggota eksekutif, yang memiliki beberapa hukum membuat input dan yang sebagian dapat menentukan kekuatan dan efektivitas penegakan hukum.<sup>19</sup>

Konsep pressure group bisa diterapkan dalam kasus Yakuza karena disini Yakuza yang merupakan sebuah organisasi yang terkoordinasi yang kemudian mempengaruhi pemerintah dan pengambilan kebijakan dimana *yakuza* tidak berusaha menempatkan diri di dalam pemerintahan tetapi mereka melakukan pendekatan kepada aktor politisi yang ada di Jepang dengan beberapa cara seperti pada kasus tahun 1999 , Eichi Nakao dari LDP ditangkap karena menerima suap dari *yakuza* melalui Wakachiku terhadap Konstruksi di Tokyo untuk menerima kontrak untuk perusahaan publik bekerja sebagai imbalan<sup>20</sup>, tindakan *yakuza* juga ikut berkampanye

---

<sup>19</sup> Ibid

<sup>20</sup> Victoria Chemko. 2002, “*The Japanese Yakuza : Influence of Japan’s International Relations and Regional Politics (East Asia and Latin America)*”, diakses dari <http://>

dan menjadi penjaga keamanan saat pemilihan umum. Yakuza juga sanggup memberikan jaminan kepada para pemilih untuk memenangkan kandidat yang mereka jagokan.<sup>21</sup>

Maka melalui tindakan yang dilakukan bisa ditarik kesimpulan dimana *yakuza* bisa dikategorikan sebagai kelompok penekan atau pressure group dimana dalam memperoleh kepentingannya mereka akan mempengaruhi para petinggi pemerintahan dan tidak segan untuk menekan para politisi atau aktor pembuat kebijakan terkait tanpa harus menempatkan wakil ke dalam pemerintahan atau partai politik tertentu.

## 2. Decision Making Procces

Decision Making Process menurut David Easton akan merujuk kembali pada bagaimana sistem politik itu, sistem adalah kesatuan seperangkat struktur yang memiliki fungsi masing-masing yang bekerja untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem politik adalah kesatuan (kolektivitas) seperangkat struktur politik yang memiliki fungsi masing-masing yang bekerja untuk mencapai tujuan suatu negara.

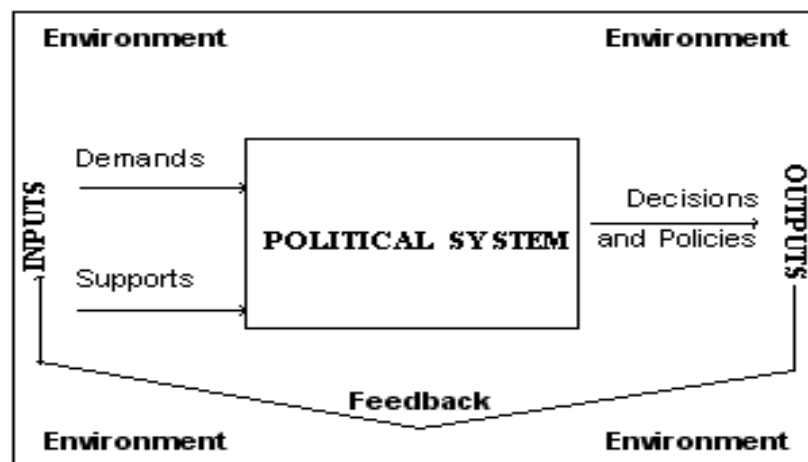
---

[www.conflicts.rem33.com/images/yett\\_secu/yakuza\\_chemko.htm](http://www.conflicts.rem33.com/images/yett_secu/yakuza_chemko.htm) , pada tanggal 12 November 2015, pada pukul 12.25

<sup>21</sup> Tempo. 2014, “10 Fakta Unik Tentang Yakuza”, diakses dari <http://dunia.tempo.co/read/news/2014/06/05/118582703/10-fakta-unik-tentang-yakuza>, pada tanggal 12 November 2015, pada pukul 00.19

Dalam kesatuan seperangkat struktur tersebut dalam kerjanya memiliki bagian dan posisinya masing masing, Dalam prakteknya di pembuatan kebijakan secara lebih mudah David Easton menggambarkan bagan dari bagaimana sebuah kebijakan itu berlangsung dan siapa saja yang memiliki pengaruh di dalam proses tersebut seperti pada bagan berikut

Gambar I.I Model Sistem Politik David Easton



Sumber : David Easton. 1965, "A System Analysis of Political Life", New York u.a., page 32, pada tanggal 12

November 2015, pada pukul 09.17

Dari gambar diatas menjelaskan bahwa :

1. Berawal dari perubahan lingkungan sosial kemudian memunculkan atau menghasilkan tuntutan dan dukungan yang dikategorikan sebagai *input* atas sistem politik.
2. Tuntutan ini adalah kelompok pendukung merangsang dan mempengaruhi kompetisi dalam sistem politik, yang mengarah ke

keputusan atau "*output*" yang ditujukan pada beberapa aspek dari lingkungan sosial atau fisik sekitarnya.

3. Setelah keputusan atau *ouput* dibuat, maka itu akan berinteraksi dengan lingkungannya, dan jika *output* itu menghasil perubahan berarti hal itu membuahkan hasil.

4. Ketika sebuah kebijakan baru berinteraksi dengan lingkungannya, kemudian akan menghasilkan tuntutan baru (*demand*) atau dukungan (*support*) baru berupa dukungan, penolakan, atau kebijakan baru pada beberapa hal terkait.

5. *Feedback* yang didapatkan selanjutnya akan kembali pada tahap pertama dan akan berjalan seperti itu terus menerus.

Sistem politik beroperasi di dalam sebuah lingkungan. Lingkungan menghasilkan tuntutan dari kelompok masyarakat yang berbeda seperti permintaan pemesanan dalam hal lapangan kerja bagi kelompok tertentu, permintaan untuk kondisi yang lebih baik kerja atau upah minimum, permintaan untuk fasilitas transportasi yang lebih baik, permintaan untuk fasilitas kesehatan yang lebih baik, dll serta tuntutan yang berbeda memiliki berbagai tingkat dukungan. Kedua 'tuntutan' dan 'dukungan' itulah kemudian dikategorikan sebagai "*input*". Setelah mengambil berbagai faktor menjadi pertimbangan, pemerintah memutuskan untuk mengambil tindakan pada beberapa tuntutan tesis sementara yang lain tidak

ditindaklanjuti. Melalui proses konversi, input diubah menjadi “*output*” oleh pengambil keputusan dalam bentuk kebijakan, keputusan, aturan, peraturan dan undang-undang. “*Output*” kemudian akan mengalir kembali ke lingkungan melalui mekanisme “*feedback*”, dan akan menghasilkan “*demand*” dan “*support*” baru terkait dengan kebijakan atau keputusan baru yang dikeluarkan dan kemudian siklus tersebut akan berputar terus dari awal hingga akhir terus menerus.

Berdasarkan teori dari David Easton di atas dapat di implementasikan kepada kasus *yakuza* yang ada di Jepang dimana disini terdapat siklus pengambilan keputusan dimana *yakuza* berperan sebagai demand atau tuntutan dan para petinggi partai atau politisi yang memiliki hubungan *yakuza* seperti golongan ultranasionalis atau partai-partai yang di danai oleh *yakuza* seperti pada kasus diatas sebelumnya.

*Yakuza* disini dikategorikan sebagai *demand* karena mereka sebagai sebuah kelompok yang memiliki kepentingan yang kemudian mereka akan mempengaruhi dan mendorong bahkan memberikan tekanan kepada para pembuat keputusan demi tujuan mereka sehingga kemudian pembuat keputusan akan memasukkan kepentingan dari *demand* ke dalam kebijakan atau keputusan (*output*) dan *output* tersebut kemudian akan diterapkan dan hal itu adalah feedback bagi input yang telah mempengaruhi pembuat kebijakan dan jika *output* yang terbentuk belum memenuhi hasil maka mereka akan terus menerus mempengaruhi pembuat kebijakan hingga

*output* yang keluar dirasa cukup untuk mewakili kepentingan dari *demand* atau dalam kasus ini *yakuza* itu sendiri.

Disini sebagai contoh *yakuza* pada pasca perang II dimana Jepang sangat mudah untuk dipengaruhi oleh golongan sayap kiri atau paham barat, maka dari itu *yakuza* mempengaruhi beserta dengan kelompok sayap kanan atau kelompok ultranasionalis sebagai contohnya adalah Mitsuru Toyama sehingga dari itu *yakuza* mendapat cukup kekuatan untuk mempengaruhi Jepang dan membetengi Jepang atas kelompok sayap kiri yang akan memberikan pengaruhnya.

#### **IV. HIPOTESA**

Jepang tidak memenuhi kewajibannya sebagai penandatangan *U.N. Convention Against Transnational Organized Crime* karena Jepang sendiri menghadapi tekanan dari *yakuza* yang ada di dalam negeri.

#### **V. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode deduktif. Ini berarti bahwa kerangka teori dan pendekatan dieksplorasi pertama maka hipotesis dapat ditarik. hipotesis maka akan dibuktikan melalui data dan analisis.

Metode pengumpulan data adalah penelitian perpustakaan di mana data merupakan sumber sekunder. Oleh karena itu, semua data yang diambil dari buku-buku, karya ilmiah, jurnal ilmiah, majalah, koran, website, dan data lain yang relevan.



Data tersebut akan dianalisis dengan teori-teori yang ditentukan sebelumnya. Ini 15 adalah untuk membuktikan bahwa hipotesis adalah akurat dan akhirnya menjawab inti dari masalah. Meskipun makalah ini menggunakan data sekunder, penulis memilih data yang akurat dan memeriksa keandalan data untuk penelitian dapat dipercaya.

## **VI. BATASAN PENELITIAN**

Batasan penelitian dalam sebuah penelitian sangat diperlukan sebagai langkah untuk menghindari luasnya pembahasan atas objek yang diteliti. Hal ini dimaksudkan agar objek penelitian menjadi jelas dan terarah serta spesifik. Dalam penelitian ini penulis akan membatasi kajian pada perubahan peran *yakuza* yang dulunya adalah pengawal Kaisar hingga sekarang menjadi organisasi yang mencakup bisnis internasional dan bahkan masuk ke dalam pemerintahan Jepang.

## **VII. SISTEMATIKA PENULISAN**

**Bab I** : Pendahuluan yang terdiri dari : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Landasan Teoritis, Hipotesa, Metode Penelitian, Batasan Penelitian dan Sistematika Penulisan.

**Bab II** : Dalam bab ini, penulis akan menjelaskan tentang profil dan sejarah *yakuza* mulai dari era Shogun Tokugawa, hingga pada Jepang dengan sistem parlementernya

**Bab III** : Dalam bab ini penulis akan membahas tentang Politik pemerintahan Jepang dinamika pengaruhnya *yakuza* di Pemerintahan Jepang dan dalam *UN Convention Transnational Organized Crime*

**Bab IV** : Pada bab ini akan berisi dengan pembuktian hipotesa dengan menggunakan dan berdasarkan dengan kerangka pemikiran yang telah digunakan.

**Bab V** : Pada bab ini berisi Penutup / Kesimpulan, yang berisi ringkasan secara keseluruhan tentang penelitian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya